

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Harga minyak dunia terus merosot dari US\$100 per barel di akhir tahun 2014 menjadi US\$28 per barel di bulan Januari 2016. Dampak yang besar sangat dirasakan oleh perusahaan minyak dan gas (migas) yang bergerak di sektor hulu. Perusahaan migas mulai melakukan berbagai efisiensi untuk mengatasi kerugian yang terjadi. Upaya yang telah dilakukan perusahaan migas untuk menutup kerugian yaitu melakukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) atau disingkat GCG. Pelaksanaan *internal control* yang efektif adalah bagian dari GCG.

Material persediaan adalah salah satu aset atau sumber daya yang penting bagi perusahaan migas untuk kelancaran dan keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan. Dalam mengelola material persediaan, dijumpai sejumlah risiko seperti adanya penyalahgunaan wewenang, persediaan rusak atau hilang, persediaan tidak digunakan atau tidak dirawat, dan pencatatan atau pelaporan persediaan tidak sesuai. Perlu upaya untuk memitigasi risiko-risiko sampai ke tingkatan yang dapat diterima perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan *internal control* atas pengelolaan material persediaan secara efektif.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan permasalahan terkait aset sehingga opini yang diberikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Badan Pemeriksa Keuangan (2015, 80) yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Nomor: 74b/LHP/XV/05/2015 tanggal 25 Mei 2015 menjelaskan masih ditemukan kelemahan dalam pengelolaan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yaitu pencatatan dan pelaporan aset KKKS belum didukung dengan sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin keakuratan dan kelengkapan data transaksi. Masih terdapat kelemahan pengendalian terkait proses pelaporan aset KKKS yaitu metode pengolahan dan pelaporan aset KKKS masih dilakukan secara manual menggunakan excel sehingga berpotensi tinggi adanya kesalahan aritmatik dan *human error*. Badan Pemeriksa Keuangan (2015, 79) membagi Aset KKKS menjadi 4 kategori yaitu Tanah, Harta Benda Modal, Harta Benda Inventaris, dan Material Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.1: Penyajian Aset KKKS dalam LKPP Tahun 2014

No.	Aset KKKS	Saldo Audited 2014	Saldo Audited 2013	Mutasi
1.	Tanah	15.273.400.409.353,00	15.197.315.580.044,00	76.084.829.309,00
2.	Harta Benda Modal	245.309.669.485.962,00	184.933.656.960.416,00	60.376.012.525.546,00
3.	Harta Benda Inventaris	30.053.848.399,00	12.013.456.609,00	18.040.391.790,00
4.	Material	25.475.969.741.133,00	21.602.317.745.465,00	3.873.651.995.668,00
	Jumlah Aset KKKS	286.089.093.484.847,00	221.745.303.742.534,00	64.343.789.742.313,00
	Akumulasi Penyusutan	(80.699.329.575.389,00)	(53.903.062.985.532,00)	(26.796.266.589.857,00)
	Total	205.389.763.909.458,00	167.842.240.757.002,00	37.547.523.152.456,00

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (2015, 79)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 02/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS adalah “Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan *eksplorasi* dan

eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.” Menurut pemaparan Kementerian ESDM saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, PT Pertamina EP merupakan salah satu perusahaan KKKS yang memiliki peran besar untuk mencapai target Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission yang selanjutnya disingkat COSO mengeluarkan kerangka *internal control* terbaru di tahun 2013 yaitu *Internal Control-Integrated Framework* yang merupakan hasil pengembangan dari *Internal Control* tahun 1992. Pengembangan *Internal Control-Integrated Framework* terbaru adalah lebih menekankan pada 17 prinsip, mempertimbangkan berbagai perubahan yang terjadi baik perubahan internal maupun eksternal, serta perluasan tujuan operasi dan pelaporan.

Tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menghadapi penurunan harga minyak dunia. Dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik salah satunya dengan penerapan *internal control* atas pengelolaan material persediaan secara efektif. Atas dasar uraian tersebut, penulis meneliti tentang mekanisme dan penerapan *internal control* atas material persediaan. Penelitian ini berjudul “ANALISIS INTERNAL CONTROL ATAS PENGELOLAAN MATERIAL PERSEDIAAN PADA KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA PT PERTAMINA EP”.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada masalah mekanisme dan penerapan *internal control* atas pengelolaan material persediaan pada PT Pertamina EP. Pengelolaan material persediaan yang dimaksud adalah proses penerimaan, penyimpanan dan perawatan, pengeluaran dan pengiriman, serta pencatatan dan pelaporan. Analisis yang dilakukan menggunakan dasar teori COSO yaitu *Internal Control-Integrated Framework* 2013. Penulisan skripsi ini dimulai sejak Bulan November 2015 s.d. Bulan Februari 2016.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana mekanisme *internal control* atas pengelolaan material persediaan pada PT Pertamina EP?
2. Apakah penerapan *internal control* atas pengelolaan material persediaan pada PT Pertamina EP sudah dilakukan dengan efektif?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana mekanisme *internal control* atas material persediaan pada KKKS PT Pertamina EP.
2. Untuk menganalisis apakah penerapan *internal control* atas material persediaan pada KKKS PT Pertamina EP sudah dilakukan dengan efektif.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu bagi:

1. PT Pertamina EP, memberikan saran atas defisiensi komponen atau prinsip *internal control* yang mengurangi kemungkinan perusahaan mencapai tujuan sehingga penerapan *internal control* atas pengelolaan material persediaan dapat dilakukan dengan efektif.
2. Peneliti, menambah wawasan peneliti dalam bidang audit internal khususnya terkait *internal control*. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana mekanisme *internal control* atas pengelolaan material persediaan pada PT Pertamina EP.
3. Pembaca, digunakan oleh peneliti lainnya sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Metodologi Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mekanisme dan penerapan *internal control* atas pengelolaan material persediaan pada KKKS PT Pertamina EP.

2. Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Neuman (1997, 23) mengatakan dalam bukunya, “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyajikan gambaran yang lengkap mengenai setting sosial dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian.” Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumen.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan pengamatan langsung di gudang material persediaan. Data sekunder yang digunakan adalah jurnal, buku, aturan pergudangan, laporan material persediaan, dan literatur lainnya.

4. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka, dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku karya ilmiah, majalah, jurnal ilmiah, *paper*, dan literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.
- b. Wawancara, dilakukan secara terarah di mana peneliti menanyakan kepada narasumber pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
- c. Observasi, pengamatan langsung penerapan *internal control* di gudang persediaan untuk mengetahui mekanisme *internal control* atas pengelolaan material persediaan.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi dalam lima bab dan sub bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan pengertian analisis, pengertian *internal control*, tujuan *internal control*, komponen *internal control*, prinsip *internal control*, *internal control* yang efektif, keterbatasan *internal control*, pengertian material persediaan, jenis-jenis material persediaan, pengertian kontraktor kontrak kerja sama, penelitian terdahulu.

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

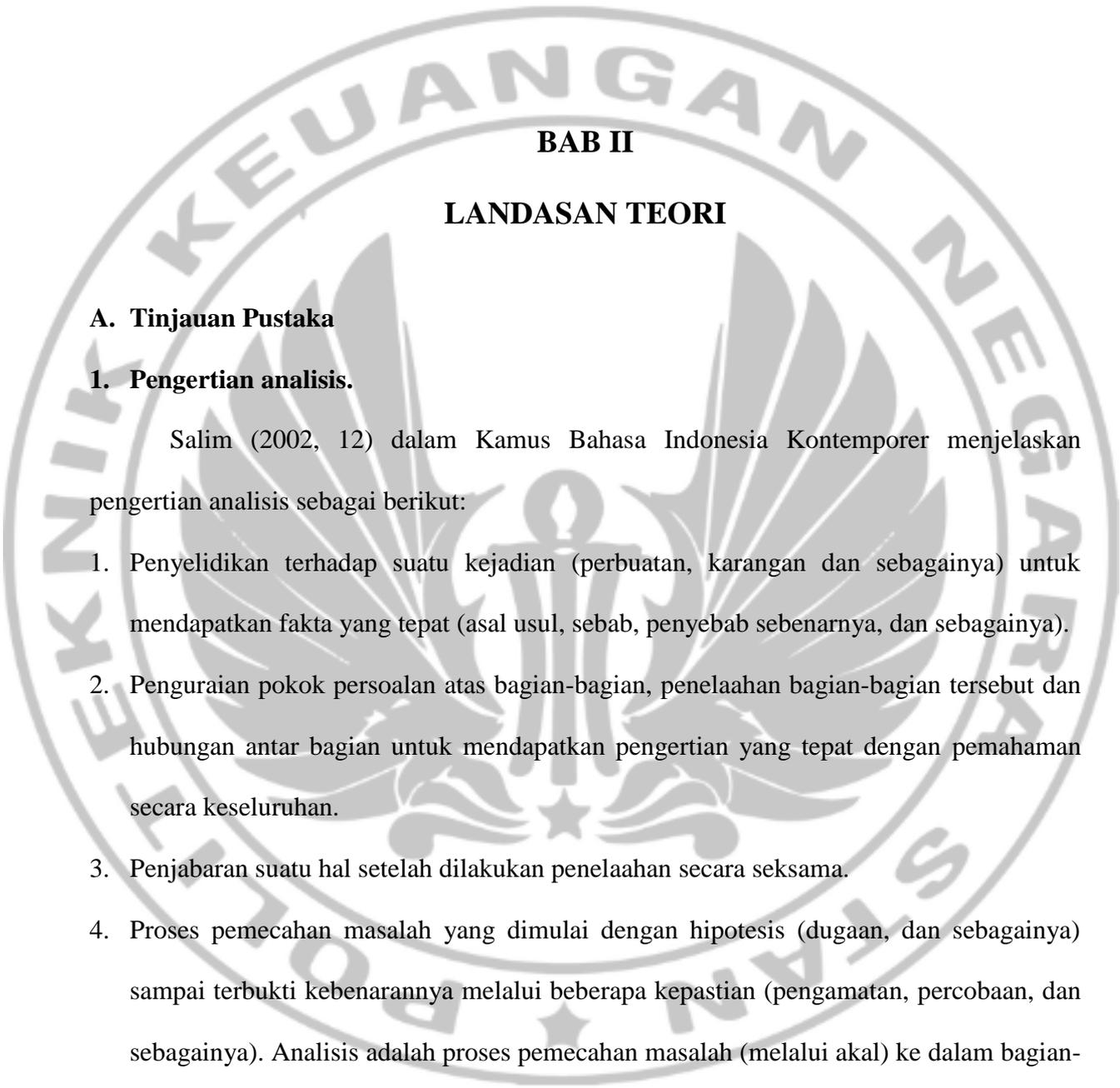
Bab ini menguraikan sejarah perusahaan, badan hukum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, kegiatan usaha perusahaan, tantangan dan kendala usaha, ketentuan pengelolaan material persediaan, dan penilaian *internal control*.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mekanisme *internal control*, analisis prinsip *internal control*, dan analisis komponen *internal control*.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian analisis.

Salim (2002, 12) dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer menjelaskan pengertian analisis sebagai berikut:

1. Penyelidikan terhadap suatu kejadian (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
2. Penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
3. Penjabaran suatu hal setelah dilakukan penelaahan secara seksama.
4. Proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya). Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagian berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

2. Pengertian *internal control*.

COSO (2013, 1) dalam *Internal Control-Integrated Framework* menjelaskan pengertian *internal control* yaitu sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan semua insan entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan entitas atau organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut dibuat luas karena *internal control* merupakan konsep dasar bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi lainnya merancang, membuat, menerapkan, dan mengevaluasi *internal control*, serta memberikan dasar untuk menerapkannya di berbagai tipe organisasi, industri, dan wilayah. Pengertian tersebut menegaskan bahwa *internal control* sebagai berikut:

1. Sebuah proses yang terdiri dari kegiatan atau cara dan sarana untuk mencapai suatu tujuan organisasi, bukan tujuan itu sendiri.
2. Dipengaruhi oleh orang artinya bukan hanya mengenai kebijakan atau prosedur, tetapi terkait perilaku orang di setiap tingkatan organisasi dan tindakan mereka yang memengaruhi *internal control*.
3. Memberi keyakinan yang memadai artinya *internal control* dapat memberi jaminan yang masuk akal, bukan jaminan mutlak/ absolut kepada manajemen senior dan dewan pengawas.
4. Dapat digunakan untuk mencapai tujuan entitas baik di salah satu tujuan atau lebih dari satu tujuan organisasi.
5. Dapat diadaptasi atau diterapkan ke seluruh struktur organisasi dari tingkat atas sampai dengan unit bisnis.

3. Tujuan *internal control*.

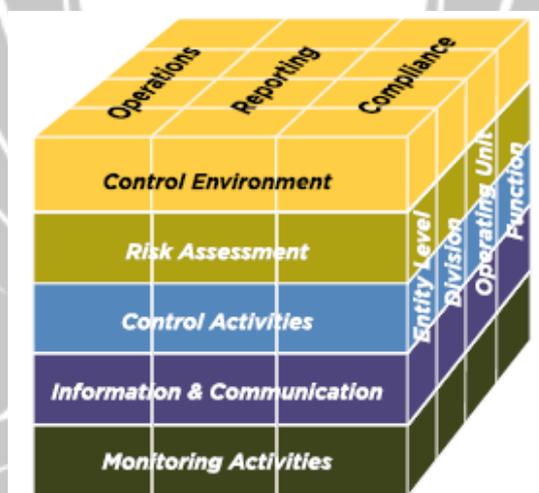
COSO (2013, 7) dalam *Internal Control-Integrated Framework* membagi tujuan suatu entitas ke dalam tiga kategori tujuan yaitu tujuan operasi, tujuan pelaporan, dan tujuan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ketiga tujuan entitas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan operasi, tujuan ini terkait dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan dan termasuk pengamanan aset. Tujuan terkait efektivitas dan efisien operasi misalnya dengan meningkatkan kinerja keuangan, produktivitas, kualitas, inovasi, konsumen, dan kepuasan karyawan. Tujuan terkait pengamanan aset misalnya efisiensi penggunaan aset, pencegahan kerugian karena limbah, gagal mempertahankan karyawan kunci, dan timbul kewajiban tak terduga.
2. Tujuan pelaporan, tujuan ini terkait dengan pelaporan keuangan dan non-keuangan baik internal maupun eksternal entitas yang meliputi keandalan, ketepatan waktu, transparansi, dan aturan lainnya sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Kriteria pelaporan keuangan dan non-keuangan eksternal dibuat berdasarkan aturan dan kebutuhan eksternal. Sedangkan kriteria pelaporan keuangan dan non-keuangan internal dibuat untuk membantu manajemen dan dewan pengawas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan bisnis.
3. Tujuan kepatuhan, tujuan ini terkait dengan kepatuhan pada aturan, standar akuntansi, dan hukum yang berlaku di mana perusahaan tersebut berperan menjadi pelaku bisnis. Entitas harus menaati peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku, misalnya aturan mengenai sumber daya manusia, perpajakan, lingkungan, standar industri, dan praktik operasi.

4. Komponen *internal control*.

COSO (2013, 5) dalam *Internal Control-Integrated Framework* membuat suatu kerangka kerja integral sehubungan dengan definisi *internal control*, komponen *internal control*, dan kriteria *internal control* untuk dievaluasi. *Internal control* memiliki 5 komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Kelima komponen tersebut memberikan suatu kerangka kerja yang efektif untuk menerapkan dan menganalisis *internal control*. Komponen-komponen tersebut adalah lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Gambar II.1: Kubus *Internal Control*



Sumber: COSO (2013, 5)

a. Lingkungan pengendalian.

Lingkungan pengendalian terkait dengan aturan, prosedur, standar, dan struktur organisasi yang merupakan dasar dalam melaksanakan *internal control* di seluruh organisasi. Lingkungan pengendalian terdiri dari 5 (lima) prinsip yaitu prinsip komitmen terhadap integritas dan nilai etika, prinsip kemandirian manajemen dan pengawasan oleh dewan komisaris, prinsip menetapkan struktur, garis pelaporan, serta wewenang dan tanggung jawab, prinsip komitmen untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai, dan prinsip akuntabilitas atas sistem *internal control*.

b. Penilaian risiko.

Penilaian risiko terkait dengan proses yang dinamis dan dilakukan terus-menerus untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang menghambat organisasi dalam mencapai tujuan. Selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk memitigasi risiko tersebut sampai ke tingkatan yang dapat diterima oleh organisasi. Risiko dapat diartikan sebagai hambatan atau tantangan organisasi dalam mencapai tujuannya. Terdapat 4 (empat) cara untuk mengelola risiko yaitu menerima risiko, menghindari risiko, mengurangi risiko, dan membagi risiko. Penilaian risiko terdiri dari 4 (empat) prinsip yaitu prinsip menetapkan tujuan organisasi dengan cukup jelas, prinsip mengidentifikasi risiko pencapaian tujuan di seluruh penjuru organisasi, prinsip memperhitungkan potensi kecurangan (*fraud*), dan prinsip mengidentifikasi dan menilai perubahan-perubahan yang memengaruhi *internal control*.

c. Aktivitas pengendalian.

Aktivitas pengendalian terkait dengan tindakan yang dilakukan melalui suatu aturan, standar, prosedur, dan kebijakan untuk memberi keyakinan pada manajemen bahwa tindakan tersebut telah mengarah untuk memitigasi risiko dalam rangka pencapaian tujuan. Aktivitas pengendalian terdiri dari 3 (tiga) prinsip yaitu prinsip menentukan dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang turut memitigasi risiko, prinsip menentukan dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum (*general control*), dan prinsip menerapkan aktivitas pengendalian yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur.

d. Informasi dan komunikasi.

Informasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab *internal control* untuk pencapaian tujuan. Sedangkan komunikasi adalah cara untuk membagi atau menyampaikan informasi yang dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Informasi dan komunikasi terdiri dari 3 (tiga) prinsip yaitu prinsip memperoleh atau menghasilkan serta

menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, prinsip mengomunikasikan informasi secara internal, dan prinsip berkomunikasi dengan pihak eksternal tentang hal-hal yang memengaruhi berfungsinya komponen lain dari *internal control*.

e. Pemantauan.

Evaluasi berkelanjutan (*ongoing*), evaluasi terpisah (*separated*), atau gabungan keduanya untuk memastikan kelima komponen *internal control*, termasuk prinsip yang mendasari tiap komponen tersebut ada dan berfungsi. Evaluasi berkelanjutan dilakukan seiring dengan berjalannya kegiatan operasional perusahaan, dibangun dalam proses bisnis dalam tingkatan berbeda dalam perusahaan, dan menyediakan informasi yang tepat waktu. Evaluasi terpisah, dilakukan periodik, berbeda dalam ruang lingkup dan frekuensi tergantung penilaian risiko, efektivitas evaluasi berkelanjutan, dan pertimbangan manajemen. Pemantauan terdiri dari 2 (dua) prinsip yaitu prinsip organisasi memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau evaluasi terpisah untuk memastikan komponen *internal control* ada dan berfungsi dan prinsip mengevaluasi dan mengomunikasikan kelemahan *internal control* kepada pihak-pihak yang sesuai dan bertanggung jawab.

5. Prinsip *internal control*.

COSO (2013, 10) dalam *Internal Control-Integrated Framework* lebih menekankan pada 17 prinsip *internal control* yang merupakan konsep fundamental yang mendasari komponen. Penjelasan mengenai ke-17 prinsip *internal control* tersebut sebagai berikut:

- 1) Organisasi menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai integritas dan etika.
- 2) Dewan menunjukkan kemandirian manajemen dan menjalankan pengawasan terhadap pengembangan dan bekerjanya pengendalian internal.
- 3) Dengan pengawasan Dewan, manajemen menetapkan struktur, garis pelaporan, serta wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dalam pencapaian tujuan.

- 4) Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten dalam keselarasan dengan tujuan.
- 5) Organisasi mendorong akuntabilitas atas sistem *internal control*.
- 6) Organisasi menetapkan tujuan dengan cukup jelas sehingga memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko terkait.
- 7) Organisasi mengidentifikasi risiko pencapaian tujuan di seluruh penjuru organisasi dan menganalisisnya sebagai dasar penentuan pengelolaan risiko.
- 8) Organisasi memperhitungkan potensi kecurangan dalam menilai risiko.
- 9) Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan-perubahan yang secara signifikan dapat memengaruhi sistem pengendalian internal.
- 10) Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang turut memitigasi risiko pencapaian tujuan pada tingkat yang dapat diterima.
- 11) Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum (*general control*) atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan.
- 12) Organisasi menerapkan aktivitas pengendalian sebagaimana dimanifestasikan dalam kebijakan untuk menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur yang relevan untuk menjalankan kebijakan.
- 13) Organisasi memperoleh serta menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung berfungsinya komponen lain dari pengendalian internal.
- 14) Organisasi mengomunikasikan informasi secara internal, termasuk komunikasi atas tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal, yang diperlukan untuk mendukung berfungsinya komponen lain dari pengendalian internal.
- 15) Organisasi melakukan komunikasi dengan pihak eksternal tentang hal-hal yang memengaruhi berfungsinya komponen lain dari pengendalian internal.

- 16) Organisasi memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi berkelanjutan (*ongoing*) dan/atau terpisah untuk memastikan apakah komponen-komponen pengendalian internal ada dan berfungsi.
- 17) Organisasi mengevaluasi dan mengomunikasikan kelemahan *internal control* secara tepat waktu kepada pihak yang sesuai dan bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen senior dan dewan direksi.

6. *Internal control* yang efektif.

Efektivitas adalah “pengukuran dalam arti tercapainya sasaran yaitu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”(Handyaningrat 2002, 16). Kegiatan dilakukan dengan efektif jika sasaran atau tujuan telah dicapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Bila tujuan atau sasaran tidak tercapai, artinya kegiatan tersebut tidak efektif. Jadi, efektif adalah suatu pencapaian sasaran atau tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya.

COSO (2013, 15) dalam *Internal Control-Integrated Framework* menjelaskan dalam menilai efektivitas *internal control*, manajemen senior dan dewan direksi menilai apakah prinsip yang mendasari tiap komponen ada dan berfungsi. *Internal control* yang efektif dapat memberikan jaminan yang memadai bagi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi, dinilai berdasarkan:

1. Tiap lima komponen dan prinsip yang relevan ada dan berfungsi. Ada berarti penetapan komponen dan prinsip yang relevan ada dalam desain dan pelaksanaan *internal control*. Berfungsi berarti komponen dan prinsip relevan diterapkan dalam pelaksanaan *internal control* tanpa ada kelemahan yang signifikan.
2. Kelima komponen beroperasi bersama dan saling terintegrasi. Beroperasi bersama dan terintegrasi artinya kelima komponen bekerja secara bersama dan saling terhubung satu sama lain dalam mengurangi risiko. *Internal control* beroperasi bersama ketika kelima

komponen ada dan berfungsi serta tidak ada defisiensi *internal control* yang signifikan memengaruhi organisasi dalam mencapai tujuan. Defisiensi adalah kelemahan komponen atau prinsip yang mengurangi kemungkinan entitas dalam mencapai tujuan.

7. Keterbatasan *internal control*.

COSO (2013, 119) dalam *Internal Control-Integrated Framework* menjelaskan *internal control* tidak peduli seberapa bagus dirancang dan dilaksanakan, hanya menyediakan jaminan yang memadai, bukan jaminan absolut kepada manajemen dan dewan direksi terkait pencapaian tujuan. *Internal control* memiliki beberapa keterbatasan yaitu:

a. *Preconditions of internal control*.

Keterbatasan yang pertama adalah kondisi awal organisasi sebelum *internal control* dibangun. *Internal control* tidak bisa mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Salah satu hal yang tidak dicakup *internal control* adalah kondisi awal organisasi sebelum menerapkan *internal control*. Kelemahan entitas dalam menentukan, mengembangkan, dan mengevaluasi manajemen dapat membatasi kemampuannya dalam melakukan pengawasan terhadap *internal control*.

b. *Judgement*.

Keterbatasan kedua adalah fakta bahwa penilaian (*judgement*) manusia dalam pengambilan keputusan bisa saja keliru. Manusia memiliki kelemahan dalam mengambil keputusan bisnis yang berdasarkan pada keterbatasan waktu, informasi yang tidak akurat, berada di bawah tekanan, atau situasi lainnya. Hal-hal tersebut membuat manusia bisa menghasilkan keputusan yang tidak tepat dan perlu diubah.

c. *Breakdowns*.

Keterbatasan ketiga adalah kerusakan yang dapat terjadi disebabkan kesalahan karyawan. Karyawan mungkin salah dalam memahami instruksi, melakukan *human error*,

melakukan suatu kesalahan teknis atau non-teknis, atau karyawan memiliki terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

d. *Management override.*

Keterbatasan keempat adalah kemampuan manajemen dalam mengabaikan *internal control*. Organisasi dengan sistem *internal control* yang efektif masih mungkin memiliki manajer yang mengesampingkan *internal control*. *Internal control* tidak akan berfungsi jika manajemen mengabaikan pelaksanaan *internal control*.

e. *Collusion.*

Keterbatasan kelima adalah kemampuan manajemen, personel, dan pihak ketiga untuk melakukan kolusi. Individu dapat bertindak secara bersama-sama untuk menyembunyikan tindakan kecurangan dan mengubah informasi keuangan atau lainnya sehingga tidak dapat dicegah dan dideteksi oleh *internal control*.

f. *External events.*

Kejadian eksternal yang di luar kemampuan perusahaan untuk mengendalikan dan berdampak pada pelaksanaan *internal control*. Misalnya terjadinya bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan kondisi lingkungan sekitar, dan perubahan kondisi ekonomi.

8. Pengertian material persediaan.

Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dalam proses produksi atau dalam perjalanan dalam bentuk bahan atau perlengkapan digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. (Warren Reeve 2005, 452). Dalam teori akuntansi keuangan, persediaan merupakan bagian dari aset yaitu aset lancar.

SKK Migas (2009, 3) dalam Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 tahun 2009 Buku Ketiga tentang Pedoman Pengelolaan Aset KKKS menjelaskan pengertian material persediaan yaitu, “Barang/ peralatan yang diadakan untuk disimpan, dirawat, dan dicatat menurut aturan

pengudangan sebelum digunakan untuk kegiatan operasi Kontraktor KKS.” Jadi, material persediaan merupakan sejumlah material standar yang diperoleh melalui serangkaian proses pengadaan yang dimaksudkan untuk disimpan, dirawat, digunakan, dan dicatat atau dilaporkan menurut aturan tertentu yang berguna untuk kelangsungan kegiatan operasional perusahaan.

9. Jenis-jenis material persediaan.

Iman Santoso (2006, 143) menjelaskan persediaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu:

- Persediaan bahan baku (*raw material*) yaitu bahan baku yang masih butuh proses lebih lanjut dalam proses produksi.
- Persediaan barang dalam proses (*goods in process*) yaitu suatu bahan baku yang sedang dalam proses pekerjaan di mana nilainya merupakan gabungan dari biaya bahan baku (*raw material cost*), biaya tenaga kerja (*direct labor cost*), dan biaya overhead (*factory overhead cost*).
- Persediaan barang jadi (*finished goods*) yaitu barang yang berasal dari barang yang telah selesai diproses dan telah siap untuk dijual sesuai dengan tujuannya.
- Persediaan bahan pembantu (*factory/ manufacturing supplies*) yaitu bahan pembantu yang dibutuhkan dalam proses produksi, tetapi fisiknya tidak dapat dilihat secara langsung.
- Persediaan barang dagangan (*merchandise inventory*) yaitu barang yang dapat langsung diperdagangkan tanpa melalui proses lanjutan.

SKK Migas (2009, 6) dalam PTK 007 Buku Ketiga tentang Pedoman Pengelolaan Aset KKKS tahun 2009 menjelaskan, “Kontraktor Kontrak Kerja Sama harus mengklasifikasikan material persediaan berdasarkan frekuensi pemakaiannya menjadi 4

(empat) jenis material persediaan.” Klasifikasi material persediaan tersebut sebagai berikut:

- 1) *Fast Moving Item* (sering digunakan) yaitu material persediaan yang pemakaian/ pengeluarannya dalam 1 (satu) tahun minimal 2 (dua) kali pada bulan yang berlainan.
- 2) *Slow Moving Item* (jarang digunakan) yaitu material persediaan yang pemakaian/ pengeluarannya dalam 1 (satu) tahun maksimal 1 (satu) kali.
- 3) Surplus Material yaitu material persediaan yang selama 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun tidak ada pemakaian/ pengeluaran.
- 4) Tidak Bergerak (*dead stock*) yaitu material persediaan yang selama lebih dari 5 (lima) tahun tidak ada pemakaian/ pengeluaran.

10. Pengertian kontraktor kontrak kerja sama.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 02/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pasal 1 Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat KKKS adalah “Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.” Badan Pelaksana dalam hal ini adalah SKK Migas yang menjadi wakil pemerintah untuk melakukan kontrak dengan KKKS. Dalam kontrak tersebut, KKKS menanggung semua biaya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi terlebih dahulu. Setelah KKKS berhasil melakukan eksplorasi dan eksploitasi, biaya tersebut akan dilakukan pengembalian oleh pemerintah atau biasa disebut *cost recovery*. Namun, pemerintah tidak akan menanggung biaya kerugian jika KKKS gagal melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil dua penelitian terdahulu yang memiliki bahasan penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebagai bahan referensi yaitu:

1. Sri Mulyani (2011, 45) dalam jurnal yang berjudul Analisis Pengendalian Intern Atas Persediaan Barang Dagangan Pada PT Grokindo memberikan simpulan atas hasil penelitian sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi PT Grokindo terdiri atas fungsi pemasaran, fungsi keuangan dan administrasi, dan fungsi logistik.
 - b. PT Grokindo belum memiliki fungsi internal auditor, yaitu bagian khusus yang secara independen melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur dan pencatatan yang ada dalam perusahaan.
 - c. Penilaian risiko yang dilakukan oleh perusahaan atas persediaan barang dagangan sudah cukup memadai. Perusahaan telah membuat kebijakan *stock opname* secara rutin setiap bulan untuk mengatasi risiko persediaan tersebut.
 - d. Pelaksanaan informasi dan komunikasi atas persediaan barang dagangan secara umum masih memadai untuk mendukung pengendalian intern.
 - e. Aktivitas pemantauan telah dilaksanakan oleh bagian logistik melalui kegiatan *stock opname* secara periodik setiap bulannya.
2. Anindita Wijaya Kusuma (2014, 12) dalam jurnal yang berjudul Analisis Pengendalian Internal Persediaan Obat Pada Apotek Kencana Semarang memberikan simpulan atas hasil penelitian sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi Apotek Kencana sudah cukup bagus karena adanya pemisahan tugas yang jelas antar bagiannya. Tetapi masih terdapat kelemahan yaitu tidak ada petugas gudang membuat para karyawan yang tidak bertugas di gudang dapat merangkap pekerjaannya sebagai petugas gudang.
 - b. Apotek masih menggunakan sistem pencatatan manual/ belum terkomputerisasi, sehingga resiko kesalahan pencatatan persediaan sangat besar.
 - c. Prosedur pengendalian atas penerimaan dan penyimpanan barang masih memiliki

kelemahan dan belum efektif, karena tidak ada bagian khusus mengurus penerimaan dan penyimpanan barang, otorisasi dilakukan oleh fungsi yang sama.

- d. Apotek Kencana melakukan *stock opname* dalam waktu satu tahun sekali dirasa kurang efektif karena dikhawatirkan terjadi risiko persediaan hilang atau rusak.
- e. Penilaian risiko yang dilakukan oleh apotek atas persediaan barang sudah efektif.
- f. Aktivitas pengendalian yang dilakukan terhadap pelaksanaan transaksi penerimaan dan pengeluaran persediaan belum cukup memadai. Apotek telah melaksanakan pemisahan tugas pada fungsi-fungsi terkait, tetapi masih ada juga perangkapan tugas pada penerimaan dan pengeluaran persediaannya.

